

MANAJEMEN KEUANGAN



NAMA : Wulandari

NIM : 2010601006

DOSEN PENGAMPU:

Hendrato S. Nugroho, SE, M.Si, CSRS

FAKULTAS EKONOMI, ILMU SOSIAL, DAN HUMANIORA JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal diantaranya surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, dan instrumen lainnya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer dan banyak dipilih investor karena manfaat memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerahan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan. Menerbitkan saham yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika perusahaan membutuhkan untuk mendapatkan pendanaan dan pasar modal juga digunakan sebagai sarana untuk berinvestasi bagi investor.

(Angraini, 2009) Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar yang manfaat menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu. Pergerakan indeks juga menjadi indikator penting bagi para investor dalam membersikan suatu keputusan untuk menjual, menahan, atau membeli saham.

Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi bergerak, naik atau turun, banyak orang akan melihatnya dari nilai indeks yang dicapai pada saat itu. Di surat-surat kabar yang menutup berita paling aktual, tidak ketinggalan juga akan dicantumkan bagaimana pergerakan indeks saham, khususnya Indeks Harga Saham Giatungan (IHSG) pada hari perdagangan terakhir.

Saham dipakai sebagai ukuran karena saham merupakan instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor. Bahkan saat ini, kegiatan politik pun juga dihubungkan dengan pergerakan harga saham yang terjadi dan terlihat dari indeks harga saham. Banyak analisis menghubungkan suhu politik yang terjadi ternyata juga berpengaruh terhadap kegiatan investasi di pasar modal. Ukuran yang dipakai juga indeks harga saham. Seringkali indeks harga saham yang mengalami kenaikan dijadikan juga indikator yang menandai kebangkitan ekonomi di masyarakat.

BAB 2

PEMBAHASAN

Instrumen keuangan

Menurut laman Investopedia, pengertian instrumen keuangan adalah kekayaan atau keuangan dapat berbentuk berkas surat berharga yang diperdagangkan. Contoh instrumen keuangan yang mudah dijumpai seperti cek, reksa dana, obligasi/ saham, ETF, dan derivative.

Deskripsi

Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan, uang tunai atau instrumen keuangan lainnya.

Instrumen Kas:

Umumnya, instrumen keuangan kas ini dibuat ataupun dikeluarkan oleh suatu badan (misalnya pemerintah dan perusahaan) agar bisa meningkatkan modalnya.

- Saham.
- Pinjaman.
- Obligasi Konversi.

Berikut adalah beberapa contoh instrumen keuangan yang bisa dijumpai di pasar modal Indonesia:

- Saham. Pengertian saham adalah bukti bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan.
- Obligasi.
- Surat Pinjaman atau Debenture.
- Derivatif.
- Reksa Dana.
- Treasury Bill/ T-Bill.
- Commercial Paper.

Jenis-jenis Instrumen Pasar Modal untuk Diketahui Masyarakat

- Investasi Finansial yang Praktis. Jenis dari investasi finansial ini adalah berbentuk cair, sering kali melakukannya harus dibudidi oleh sekuritas.
- Penanaman Modal Melalui Saham.
- Reksa Dana untuk Pendanaan.
- Instrumen Pasar Modal Obligasi.
- Perjanjian Derivatif.

Instrumen Keuangan yang Diperdagangkan di Indonesia

Bila Anda memang tertarik untuk memasuki pasar modal dan juga pasar uang yang ada di Indonesia, maka Anda bisa membeli beberapa produk instrumen keuangan di IDX. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di dalam bursa ini kebanyakan adalah instrumen keuangan jangka panjang. Beberapa instrumen finansial tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Instrumen Kas

Umumnya, instrumen keuangan kas ini dibuat stiapan dikeluarkan oleh suatu badan (umumnya pemerintah dan perusahaan) agar bisa meningkatkan modalnya. Dalam konteks ini, badan ini sering disebut dengan emiten.

Nilai harga dalam mencapai instrumen kas, biasanya yang ditetapkan oleh penerbit ataupun dicapai melalui proses negosiasi antara pihak penerbit dan investor, umumnya dibeli agar bisa meningkatkan keuntungannya.

Setelah instrumen kas ini dikeluarkan dan dijual, maka pemegangnya memiliki hak untuk memuaunya secara terbuka di pasar uang, dengan suatu harga yang sudah ditentukan menggantikan penawaran dan permintaan.

2. Saham

Sama seperti namanya, saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan.. bila suatu perusahaan mengeluarkan 100 saham, maka Anda berhak membeli 1 diantara 100 saham tersebut. Anda mempunyai 1/100 atau satu persen saham perusahaan tersebut.

Sejak saat itu, maka Anda bisa menjual saham tersebut, dan juga memiliki hak satu persen atas setiap dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, serta satu persen suara pada rapat umum pemegang saham.

3. Obligasi

Obligasi merupakan sertifikat yang diberikan oleh pihak penerbit ataupun peminjam kepada pihak investor dengan imbalan sejumlah uang tunai.

Dalam kasus obligasi, dokumen akan sangat menentukan syarat dan ketentuan, termasuk di dalamnya ukuran dan frekuensi pembayaran kupon atau bunga dan tanggal obligasi pun harus bisa dihitung.=

Gagal membayar kupon secara tepat waktu atau membayar kembali obligasi ketika jatuh tempo akan membuat pihak penerbit mengalami risiko gagal bayar oleh pemegang obligasi yang bersangkutan.

Karena pihak pemerintah tidak menerbitkan saham, maka obligasi adalah instrumen keuangan yang diandalkan untuk mengumpulkan uang dari pihak investor. Setiap saat akan ada banyak triliunan dolar obligasi pemerintah yang sudah beredar.

4. Pinjaman

Pinjaman dibuat oleh bank dan juga lembaga kredit lainnya pada organisasi seperti pihak perusahaan ataupun lembaga pemerintahan.

Dari sisi pinjaman, pinjaman akan terlihat cukup mirip dengan obligasi karena hanya ada lebih sedikit dari pihak yang terlibat, mereka akan jauh lebih mudah dan juga lebih cepat untuk melakukan negosiasi dan didokumentasikan daripada obligasi, yang umumnya mempunyai ribuan investor.

5. Obligasi Konversi

Obligasi konversi adalah suatu obligasi yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi saham pada waktu yang akan datang. Obligasi konversi menjadi obligasi untuk bagian pertama di periode investasi, lalu mereka dibayar kembali ataupun diubah menjadi bentuk saham pada periode selanjutnya.

Syarat untuk obligasi konversi akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran kapital dan persyaratan serta tanggal pembayaran kembali atau guna konversi.

Obligasi konversi juga sering dikonversi pada ekuitas di peristiwa pemisau, dan yang paling umum adalah penerbitan serta penjualan saham baru oleh pihak perusahaan.

Konversi Utang

Konversi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi bentuk ekuitas di masa yang akan datang. Syarat mutu untuk konversi utang akan sangat menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran bunga, serta persyaratan dan tanggal pembayaran kembali ataupun konversi.

Sama halnya seperti obligasi konversi, alih-alih pada tanggal tertentu, pinjaman akan lebih sering dikonversi menjadi ekuitas ketika terjadi peristiwa pemisau.

Bos BCA Sebut Nilai Kapitalisasi Pasar Saham BBCA Setara 6 Decacorn

1. Liputan6.com, Jakarta PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bahkan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jajja Setiastmadja menyebutkan, kapitalisasi pasar saham BBCA kalau ada unicorn, nilainya bisa setara enam decacorn.
2. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), per 15 Oktober 2021, kapitalisasi pasar saham BBCA mencapai Rp 934 triliun. Kapitalisasi pasar saham BBCA ini terbesar di BEI. Kemudian disusul PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) senilai Rp 648 triliun, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 377 triliun.
3. Jajja mengatakan, salah satu mengenai saham *top notes* dilihat salah satu indikatornya dari nilai kapitalisasi pasar.
4. "Dengan harga Rp 7.500 market cap BCA sudah lebih Rp 900 triliun. Pada Rp 8.250, sempat melebihi Rp 1.000 triliun. Kalau dibagi dolar Amerika Serikat Rp 14.200 kira-kira USD 63 miliar-USD 65 miliar. Kalau ada unicorn, 6 decacorn. Satu decacorn USD 10 miliar. Ini sudah USD 63 miliar, nilainya 6 decacorn," ujar dia dalam tayangan video, diskusi Minggu (17/10/2021).
5. Jajja juga membagikan kiat investasi saham. Salah satunya dengan melihat langkah yang dilakukan seperti investor institusi, asing dan fund manager, usung baner memegang saham kapitalisasi pasar besar.
6. "Karena performance mereka diukur dengan kenaikan atau penurunan dari indeks Jakarta Stock Exchange. Kalau tidak koleksi *big market cap*, performa bisa underperform," kata dia.
7. Oleh karena itu, ia mengatakan, investor institusi cenderung lebih memilih saham kapitalisasi pasar besar. "Saham *big market* lebih favorit," kata dia.
8. Jajja menilai, saham kapitalisasi pasar besar menjadi pilihan investor institusi karena lebih tahan terhadap sentimen.
9. Jajja mencontohkan, kalau ada sentimen Amerika Serikat akan lakukan tapering November hingga tahun depan, trade war antara AS dan China, harga komoditas tinggi, potensi kasus COVID-19 dapat memicu koreksi saham. Meski demikian, ia mengatakan, ketika kondisi normal, saham kapitalisasi pasar besar akan paling cepat naik.
10. "Ini tak akan hindarkan penurunan saham termasuk *market cap* besar. Kondisi normal paling cepat naik *market cap*nya besar. Kalau tunggu-tunggo kelemparan kereta, jadi buru-buru buyback dan sebelumnya jual saham," ujar dia.

Link artikel: <https://www.liputan6.com/saham/read/4686762/bos-bca-sebut-nilai-kapitalisasi-pasar-saham-bbca-setara-6-decacorn>

Perlakuan Instrumen Keuangan Berdasarkan SAK Konvergensi IFRS

^{1,2} Elly Astuti, ¹ Nur Wahyuning Sulistyowati

¹ Universitas PGRI Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Email komunikasi: elystuti@apma.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to discuss IFRS-based IFRS implementation in the financial instruments component. Approach is done with descriptive qualitative analysis to compare the regulation with the company financial report. This research only involves one banking company that is bank BTN. Selection of Bank BTN due to the special characteristics that provide loans for People's housing loans with very long maturity so that the possibility of financial instrument treatment is different. The results of the analysis show that Bank BTN has complied with all IFRS-based IFRS regulations relating to financial instruments. This is possible because the process of IFRS convergence that conducted by IAI gradually so that the banks can apply it continuously in order to improve the quality of accounting information presented. This research is expected to provide input for regulatory and regulatory bodies of standards regarding the development of regulations on financial instruments as well as to produce information relevant to the economic decision-making process of various parties.

Keywords: Financial Instruments; IFRS Convergence; Banking Industry

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan implementasi SAK berbasis IFRS dalam komponen instrumen keuangan. Pendekatan yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan regulasi dengan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini hanya melibatkan satu perbankan yaitu bank BTN. Pemilihan Bank BTN karena karakteristik khususnya yang memberikan pinjaman untuk Kredit perumahan Rakyat dengan jatuh tempo yang sangat lama sehingga dimungkinkan perlakuan instrumen keuangan mengadopsi perbedaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank BTN telah mematuhi semua regulasi SAK berbasis IFRS yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Hal ini dimungkinkan karena proses adaptasi IFRS yang dilakukan oleh IAI secara bertahap sehingga tidak perlu diperlukan dapat memerlukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas informasi akademisi yang disajikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagi regulator dan badan pengawas standar mengenai pengembangan regulasi mengenai instrumen keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan bagi proses pengambilan keputusan ekonomik berbagai pihak.

Kata Kunci: Instrumen Keuangan; Konvergensi IFRS; Industri Perbankan

Saran: Astuti, E., & Sulistyowati, N. (2019). Perlakuan Instrumen Keuangan Berdasarkan SAK Konvergensi IFRS. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(01), 81-92. doi:

EPMI:

1. Pendahuluan

Selama proses konvergensi IFRS terjadi pergeseran metode historical cost menuju fair

value. Instrumen keuangan menjadi salah satu komponen yang tentan terhadap asymetri informasi (Landman, 2008). Asimetri informasi tersebut terjadi karena untuk beberapa instrumen keuangan tidak tersedia harga pasar akilhnya, sehingga manajemen diperkenankan untuk menggunakan model penilaian. Model penilaian tersebut tentu mengundung unsur subjektivitas manajemen atas informasi privat yang dimilikinya.

Regulasi mengenai instrumen keuangan perusahaan termuat pada PSAK 50, 55 dan 66. Sedangkan untuk pengukuran nilai wajarnya teruang pada PSAK 68. Pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) efektif per 1 Januari 2017, regulasi instrumen keuangan masih mengacu pada IAS 39. Namun pada pertengahan 2017 IAI telah mengesahkan PSAK 71 yang telah mengacu IFRS 9. PSAK 71 diproyeksikan untuk menggantikan PSAK 55 yang dianggap tidak relevan.

PSAK 71 menegaskan perusahaan untuk melakukan estimasi atas kerugian penurunan nilai pasar dan risiko yang terkandung dalam instrumen keuangan. Jika terjadi perubahan atas estimasi arus kas kontraktual yang besar, perusahaan diwajibkan untuk mengevaluasi besarnya cadangan yang telah dilakukan. Hal ini sangat berbeda dengan regulasi yang tertuang dalam PSAK 55 dimana pengakuan kerugian itu hanya akan dilakukan setelah terjadinya.

Perubahan regulasi instrumen keuangan memberi dampak signifikan pada pelaporan keuangan perusahaan utamanya pada perusahaan perbankan. (Astuti dan Suliaryati, 2017) mendokumentasikan bahwa dalam proses adaptasi IFRS, perusahaan perbankan selalu mematuhi regulasi yang ditetapkan secara bertahap dengan mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangannya kemandirian menerapkannya bahkan sebelum unggal efektif diberlakukan. Namun demikian, pada penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu perusahaan perbankan BUMN.

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengungkapkan bagaimanakah perlakuan

instrumen keuangan pada perusahaan perbankan utamanya pada Bank Tabungan Negara (BTN). Hal ini menarik untuk dianalisis karena sektor utama BTN adalah kredit perusahaan dengan proyeksi arus kas kontraktual pada periode yang cukup panjang, sehingga kemungkinan risiko inheren atas instrumen keuangan pada limi bisnis tersebut cukup besar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *perempitif* dengan bentuk kualitatif. Melalui pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis perkembangan standar akuntansi mengenai instrumen keuangan yang tertuang dalam PSAK 50, 55, 60 dan 68. Hasil analisis kemandirian digunakan sebagai acuan untuk mereview penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan perusahaan Bank Tabungan Negara (BTN). Hasil pembandingan kemandirian digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan penelitian sementara.

Analisis lanjutan dilakukan dengan mencari literatur terkait perkembangan standar akuntansi keuangan utamanya yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Hasil kajian literatur kemandirian diperbandingkan lagi dengan hasil analisis laporan keuangan perusahaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Regulasi instrumen keuangan telah teruang pada PSAK 50, 55, 60 dan 68 yang telah direvisi pada tahun 2014. PSAK 50 yang ditetapkan di Indonesia pada tahun 2015 masih mengacu pada IAS 32 per 1 Januari 2014. PSAK 55 masih mengacu pada IAS 39 per 1 Januari 2014. Sedangkan untuk PSAK 60 dan 66 regulasi akuntansi di Indonesia telah mengacu pada IFRS 7 dan IFRS 13 per 1 Januari 2014.

Tahun 2015 merupakan *full adoption* IFRS tahap kedua. Beberapa PSAK yang belum mengacu IFRS tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa pertimbangan dewan pembiaya standar yang memiliki pandangan bahwa kita belum siap untuk melakukan adaptasi IFRS 9 terkait pengakuan, pengungkapan dan penyajian instrumen keuangan utamanya bagi

perusahaan perbankan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang semula *historical cost* menjadi *fair value* memberikan dampak yang cukup signifikan bagi instrument keuangan. IFRS 9 baru diadaptasi pada pertengahan tahun 2017 dan tertuang dalam PSAK 71 yang diproyeksikan akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Penerapan awal atas regulasi tersebut diperkenalkan per 2018.

Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atas komponennya sebagai habilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual

Classification

The new accounting for financial assets by the history cost or fair value

- Financial assets at fair value through profit or loss, which have the characteristics, i.e. financial assets measured at fair value with changes in equity and finance assets classified as held-for-trading
- Loans and receivables
- Impairment indicators
- Available-for-sale investments

dan definisi habilitas keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas (PSAK 50 PP 15 Tahun 2015). Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan dibenarkan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan instrumen keuangan yang dimilikinya.

Bank BTN menyatakan telah memenuhi regulasi yang tertuang dalam PSAK 50, 55, 60 dan 68 revisi 2014. Bank BTN telah mengklasifikasikan aset keuangan dalam empat kategori dan habilitas keuangan dalam dua kategori. Adapun definisi dan klasifikasi yang dilakukan oleh Bank BTN seperti ilustrasi gambar 1.

Financial assets are classified into the following categories or asset recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which have been reclassified. i.e. Financial assets measured at fair value with changes in equity and finance assets classified as held-for-trading
- Other financial assets that are not classified as financial assets at fair value through profit or loss, fair value measurement and available-for-sale investments

Gambar 1. Klasifikasi Instrumen Keuangan Bank BTN

Pengelaskan mengenai klasifikasi yang telah dilakukan oleh Bank BTN telah sesuai dengan PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pada laporan keuangan yang disajikan oleh Bank BTN dijelaskan mengenai kelompok yang termasuk dalam aset keuangan ataupun habilitas keuangan. Pengelaskan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses pengukuran awal, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penghitungan pengakuan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan di Bank BTN dikenai pada tanggal penyelesaian. Bank BTN menggunakan opsi nilai wajar pada pengakuan awalnya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PSAK 55 PP 44, PPS3-55. Bisnis transaksi yang terjadi pada perolehan aset keuangan ataupun penerbitan habilitas keuangan diatribusikan secara langsung. Praktik tersebut juga telah sesuai dengan PSAK 55 PP 43 yang menyatakan bahwa:

"Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau habilitas keuangan, entitas mengakui pada nilai wajarnya. Bisnis hasil aset keuangan atau habilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melainkan laba rugi, nilai pasar tersebut ditumbuh biaya rumah tangga yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penciptaan atau pemungutan atau habilitas keuangan tersebut."

Pengakuan setelah pengakuan awal instrumen keuangan Bank BTN menggunakan dasar suku bunga efektif, kecuali untuk instrumen keuangan yang pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Praktik yang diterapkan oleh Bank BTN telah sesuai dengan PSAK 55 PP 45-47.

Penghitungan pengakuan instrumen keuangan didasarkan pada hak kontraktual arus kasnya. Penghitungan pengakuan tersebut harus dilakukan ketika seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan sudah tidak lagi dimiliki perusahaan (PSAK 55 PP17 dan PP 20).

Bank BTN telah memperlakukan aset keuangan yang telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam laporan keuangannya ditemukan ketetapan bahwa bank telah memstratifikasi seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan secara substansial maka pengakuan atas komponen aset keuangan tersebut dibentuk.

Bank BTN juga telah membatasi reklasifikasi instrument keuangan yang diperkenankan oleh entitas. Adapun aturan yang ditetapkan oleh Bank BTN dalam catatan atas laporan keuangannya diketahui bahwa Bank tidak memperbolehkan reklasifikasi jika pada saat pengakuan awal, kelompok instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas juga memetapkan bahwa bank tidak boleh mengklasifikasikan aset yang dimiliki hingga jangka tempo jika dalam dua tahun sebelumnya terjadi reklassifikasi stempor dijual dalam jumlah yang signifikan. Ketentuan tersebut sesuai dengan PSAK 55 PP 52 Tahun 2015 "Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atau investasi dimiliki hingga jangka tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah tidak signifikan yang tidak memenuhi kriteria definisi instrument keuangan yang telah ditetapkan, maka bisa investasi yang dimiliki hingga jangka tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual. Dalam reklassifikasi tersebut selain antara jumlah tercatat dengan

nilai wajar diukur pada pendapatan komprehensif lainnya".

Pengukuran nilai wajar instrument keuangan tertuang dalam PSAK 68 yang disahkan IAI pada tanggal 19 Desember 2013 dan diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2015. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penentuan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan harga pasar yang berlaku untuk instrument keuangan tersebut, namun jika harga pasar yang dipersyaratkan tidak ada, perusahaan dapat menggunakan harga dari instrument yang identik. Jika harga atas instrument yang identik juga tidak ditemukan, perusahaan diberlakukan untuk menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan input yang dapat diobservasi dan meminimalkan input yang tidak dapat diobservasi (PSAK 68 PP 61 tahun 2015). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan nilai wajar instrument keuangan yang tidak tersedia harga pasarnya melibatkan unsur subjektivitas manajemen, sehingga untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingannya diberikan regulasi mengenai hierarki nilai wajar yang terbagi dalam 3 level (PSAK 68 PP 72-90).

Bank BTN telah mengungkapkan proses pengakuan nilai wajar dalam laporan keuangannya yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PSAK 68 tahun 2015. Adapun hierarki nilai wajar pada Bank BTN dijelaskan dalam Ilustrasi Gambar 2.

Bank uses available information to measure assets in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, according the use of relevant measurement tools and resources for the asset that are not otherwise.

All assets and liabilities whose fair value is measured or disclosed in the financial statement can be classified in the value hierarchy levels depend on the lowest level of input that is equivalent to the most fair value measurement.

- Level 1: quoted prices (parameters) in active markets for identical assets or liabilities when the transaction or the measurement date.

- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the asset and liability either directly or indirectly.

- Level 3: inputs that are unobservable for the asset and liability.

Gambar 2. Hierarki Nilai Wajar Bank BTN

Pada proses pengukuran Bank BTN telah mengungkapkan pembandingan nilai tercatat dan

nilai wajar dengan hierarki sesuai dengan PSAK 68 PP 72-90.

Glossary, Penjelasan dan Waktu Instrumen Cuan dan Rantai BPN

Untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan dengan nilai wajarnya, perusahaan juga ditugaskan untuk mengvaluasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimilikinya. Kewajiban untuk melakukan penurunan nilai instrumen keuangan tertuang dalam PSLK 55 PPAS-70. Pelaksanaan penurunan nilai atas keuangan ini berjalan pada klasifikasi aset yang diberikan manajemen atas aset keuangan yang dimilikinya.

Bank BTN juga telah mematuhi regulasi tersebut dan menggunakan karyanya secara efektif pada penyelesaian risiko kredit yang dimiliki. Penurunan nilai yang diwujudkan pada laporan keuangan Bank BTN juga telah mengikuti kaidah klasifikasi asset kewangan yang telah ditetapkan dalam PSAK 55. Adapun pengakuan atas pengakuan pemutusan nilai asset kewangan yang dilakukan oleh Bank BTN disajikan dalam Chapter 4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Chlorinated Phenols and their Derivatives. II. Part 1. Preparation of Chlorophenols

PSAK 60 PP31 mengelaskan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan nilai dan cukupan risiko yang tambal atas instrumen keuangan yang dimiliki bank secara kuantitatif ataupun kualitatif. Risiko yang harus diungkapkan untuk komponen instrumen keuangan meliputi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

Bank BTN telah melakukan pengelolaan risiko atas instrumen keuangan yang dimilikinya dengan menggunakan day to day risk management activities. Hal ini dilakukan karena mayoritas fin protfolio kredit Bank BTN berbentuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang sangat dipengaruhi oleh laju inflasi dan BI rate.

Untuk memantau risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar Bank BTN telah melakukan stress testing secara berkala. Pada laporan keuangan yang disajikan, Bank BTN telah mengelola risiko kredit secara memadai dengan membentuk komite manajemen risiko yang profesional.

Bank BTN juga telah mengungkapkan risiko kredit kuantitatif seperti yang telah dipersyaratkan pada PSAK 60 PP 36-38. Regulasi tersebut mewajibkan entitas untuk mengungkapkan risiko kredit berdasarkan kelas instrumen keuangan, waktu jatuh tempo dan penurunan nilainya.

II Datasheet Berikut (H. 2018)

Batas jangka tempo atau risiko makroekonomik perubahan atau faktor pasar dan non-fisik	Risiko kredit				Property Leasing Business services Trading,wholesaler and Retail Bank services Funding Transportation, manufacturing and construction Finance Others Daerah, area and sector Others Total Change in foreign exchange rates Interest rates Inflation
	Risiko kredit High grade	Risiko medium Standard grade	Risiko medium Investment	Risiko medium Investment	
Risektan	100.000.000	20.000.000	10.000.000	200.000	110.200.000
Risektan	1.000.000	200.000	100.000	40.000	1.340.000
Risektan pasca-pembelian	1.000.000	200.000	100.000	40.000	1.340.000
Risektan pasca-pembelian dan pembelian	1.000.000	200.000	100.000	40.000	1.340.000
Risektan	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Risektan pengembangan dan konstruksi	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Risektan	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Risektan	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Risektan	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Risektan	10.000	2.000	1.000	400	13.400
Total	100.000.000	20.000.000	10.000.000	200.000	110.200.000
Change in foreign exchange rates Interest rates Inflation					0.000.000
					0.000.000

Gambar 5. Pengungkapan Risiko Kredit Instrumen Keuangan Bank BTN

PSAK 60 PP 39 juga memberikan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas risiko likuiditas yang dimilikinya. Pengungkapan tersebut harus memuat analisis jatuh tempo untuk likuiditas keuangan derivative ataupun non derivative diantar penjelasan bagaimana

perusahaan mengelola risiko likuiditas yang melekat pada likuiditas keuangan tersebut. Bank BTN juga telah memenuhi kewajiban pengungkapan tersebut dalam laporan keuangannya dengan menggunakan pengukuran Status Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi arus kas, dan stress testing.

All Departments in 2023						Total
Category	Department	Revenue	Profit Margin	Net Profit	Employees	Headcount
Product	Electronics	\$120M	15%	\$18M	100	100
Product	Apparel	\$80M	12%	\$9.6M	80	80
Product	Home Goods	\$70M	10%	\$7M	70	70
Service	Customer Support	\$50M	8%	\$4M	50	50
Service	Logistics	\$40M	7%	\$2.8M	40	40
Service	R&D	\$30M	10%	\$3M	30	30
Service	Manufacturing	\$20M	10%	\$2M	20	20
Total	All Departments	\$450M	11.8%	\$60.8M	300	300
Total	Electronics	\$120M	15%	\$18M	100	100
Total	Apparel	\$80M	12%	\$9.6M	80	80
Total	Home Goods	\$70M	10%	\$7M	70	70
Total	Customer Support	\$50M	8%	\$4M	50	50
Total	Logistics	\$40M	7%	\$2.8M	40	40
Total	R&D	\$30M	10%	\$3M	30	30
Total	Manufacturing	\$20M	10%	\$2M	20	20
Total	All Departments	\$450M	11.8%	\$60.8M	300	300

Gantikan R. Prayitno dan Dikta Liliawati Bank BTPN

Bank BTN juga telah melaksanakan analisis sensitivitas untuk mengelola risiko pasar atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Analisis sensitivitas yang digunakan sebagai dasar pengelolaan risiko pasar adalah risiko suku bunga dan risiko pasar. Hal ini sejalan dengan PSAK 01-PP 01-01 tahun 2015. Analisis

sensitivitas Bank BTN dikalokasi dengan melakukan estimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan beresiko dari faktor pasar, dengan menggunakan sejumlah variabel lainnya tetapi, Pengelolaan risiko pasar berikut tergambar dalam **Diagram 2**.

Gitar & Akustik Music Solo Show

Pada awalnya Bank BTN menganggapkan dirinya sebagai bank simpanan dan investasi berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi dalam sektor

penilaian tersebut kewajiban Bank BNI mengikuti arah yang ditetapkan instrumen keuangan pada titik awal mulai berasal dari

Digitized by srujanika@gmail.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Gambar 8. Penentuan Dampak Risiko Pekerja

Page 10

Standar Akademik Kewajiban Indonesia terus diperbaiki secara berkesinambungan sehingga terjadi konsistensi dengan standar IAI untuk mengadaptasi MRS. Proses adaptasi pernah dihimpun pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 telah mencapai tahap kedua. Proses penyusunan, amandemen, integrasi penetapan standar baru mengalihbentuk jgap antara SAC di Indonesia dengan MRS semakin sejajar.

Institusi lembungan merupakan salah satu komponen dalam lembaga pemerintahan perdesaan yang regulasinya harus mengikuti perkembangan ketahui dengan IFRS. Regulasi instrumen lembungan termasuk dalam PSAK 30, 35, 60 dan 68. Namun demikian PSAK 30 masih mengacu pada IAS 32. PSAK 35 mengacu pada LKS 30 sedangkan PSAK 60 dan 68 telah mengacu pada IFRS 7 dan 13. Untuk itu, regulasi ini akan harus berkenabung agar semakin mendekati IFRS sehingga dapat meningkatkan

Kualitas Jepitan Leuangan dan Keterbatasannya Pada Masa

Penerapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana level adaptasi standar yang berluring dalam PSAK disarankan sedalam praktik. Perubahan standar yang sangat cepat dan pergeseran yang berkelanjutan membulakan pertanyaan apakah adaptasi IFRS ini juga dapat diikuti penerapannya dalam praktiknya secara cepat. Hal ini memberi tantangan bagi para Bank HTM sebagai suatu entitas perbankan yang memiliki konsep dan instrumen keuangan yang cukup besar, namun juga megimplementasikan adaptasi standar baru yang dikeluarkan oleh IA.I sesuai dengan tanggap perubahannya efektifnya. Hal ini memungkinkan bahwa terjadi sinkronisasi dimana lingkungan praktik dapat mengikuti perubahan standar secara berurutan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang dijadikan dasar analisis hanya satu perusahaan saja yaitu Bank BTN. Untuk penelitian mendalam ditengah dunia dapat

menambah sampel observasi serta dapat menetapkan kriteria kepatuhan standar. Hal selanjutnya yang memerlukan untuk dikaji pada penelitian masa mendatang adalah implementasi perkembangan standar akuntansi pada perusahaan tambang karena proses penentuan nilai wajar atas sumber daya tambangnya memiliki karakteristik yang unik.

5. Daftar Pustaka

- Astuti, E. and Sulistiyowati, N. W. (2017). 'ANALYSIS OF IMPLEMENTATION SAK CONVERGED IFRS FOR FINANCIAL', 40(Icme), pp. 97-108. Available at: <https://www.academia.edu/35885682>.
- BTN. (2015). Laporan Keuangan 2015. www.bnri.co.id
- Badan Akuntan Indonesia. (2017). Standar Akuntansi Keuangan 2017. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Badan Akuntan Indonesia.
- Badan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan 2017. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Badan Akuntan Indonesia.
- Badan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan 2017. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Badan Akuntan Indonesia.
- Landsman, W. R. (2006) 'Fair value accounting for financial instruments: some implications for bank regulation', *BIS Working Papers*, (209).